

**TREN DESENTRALISASI DI ASIA TENGGARA:
ANALISIS BIBLIOMETRIK**

**DECENTRALIZATION TRENDS IN SOUTHEAST ASIA:
A BIBLIOMETRIC ANALYSIS**

^a Serly Wulandari, ^b Muhammad Baharuddin Zubakhrum Tjenreng

^a Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jl. Ir. Soekarno Km. 20, Jatinangor 45363
email: serlywulandari@ipdn.ac.id

^b Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jl. Ir. Soekarno Km. 20, Jatinangor 45363
email: zubakhrum@gmail.com

Abstract

Problem: Authoritarianism has been a defining feature of governance in many Southeast Asian countries, driving the adoption of decentralization policies to enhance governmental efficiency and public participation. However, the implementation of decentralization in the region has demonstrated complex dynamics, both politically and administratively, thereby requiring deeper examination of its trends and developmental trajectories.

Purpose: This study aims to analyze decentralization trends in Southeast Asia through a literature-based approach, mapping the evolution of publications, the most influential authors and articles, inter-author networks based on national affiliations, and inter-article linkages derived from keyword co-occurrence.

Methodology: The research employs descriptive bibliometric analysis using data extracted from the Scopus database. VOSviewer software was utilized to generate network, density, and overlay visualizations.

Findings/Results: The analysis indicates that decentralization has gained scholarly attention since the 1960s, with a peak in publications in 2019 amounting to 20 articles. The article titled Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-Institutionalist Perspectives by Hadiz V.R. (2004) received the highest number of citations (213 times). Indonesian scholars dominate the field with 86 publications and 32 collaborative networks. Keyword co-occurrence analysis reveals three main clusters, with fiscal decentralization emerging as a frequently discussed topic since 2018. Potential research avenues for future exploration include accountability, regional autonomy, poverty, expenditure, influence, devolution, interest, practice, effectiveness, case studies, gaps, positive impacts, economic growth, and corruption.

**Corresponding Author*

email: serlywulandari@ipdn.ac.id

Type of Research: Bibliometric Analysis

Keywords: Decentralization, Southeast Asia, Bibliometric Analysis

Abstrak

Masalah: Otoritarianisme telah menjadi ciri khas pemerintahan di banyak negara Asia Tenggara, yang mendorong adopsi kebijakan desentralisasi untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan partisipasi masyarakat. Namun, implementasi desentralisasi di kawasan ini menunjukkan dinamika yang kompleks, baik dari segi politik maupun administratif, sehingga memerlukan kajian yang lebih mendalam terkait tren dan arah perkembangannya..

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren desentralisasi di Asia Tenggara melalui studi literatur, serta memetakan perkembangan publikasi, penulis dan artikel yang paling berpengaruh, peta keterkaitan antarpengarang berdasarkan afiliasi negara, dan peta keterkaitan artikel berdasarkan co-occurrence kata kunci.

Metodologi: Penelitian menggunakan metode analisis bibliometrik deskriptif dengan data yang diambil dari basis data Scopus. Analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak VOSviewer untuk menghasilkan visualisasi network, density, dan overlay maps.

Temuan/Hasil Penelitian: Hasil analisis menunjukkan bahwa topik desentralisasi mulai mendapat perhatian sejak tahun 1960, dengan puncak publikasi pada tahun 2019 sebanyak 20 artikel. Artikel berjudul *Decentralization and democracy in Indonesia: A critique of neo-institutionalist perspectives* oleh Hadiz V.R. (2004) memperoleh sitasi tertinggi sebanyak 213 kali. Penulis dari Indonesia mendominasi publikasi dengan 86 artikel dan 32 total jaringan kolaborasi. Analisis co-occurrence kata kunci menunjukkan terbentuknya tiga kluster utama, dengan fiscal decentralization menjadi topik yang semakin sering dibahas sejak 2018. Topik potensial yang dapat dikembangkan di masa depan meliputi accountability, regional autonomy, poverty, expenditure, influence, devolution, interest, practice, effectiveness, case study, gap, positive impact, economic growth, dan corruption.

Jenis penelitian: Analisis Bibliometrik

Kata kunci: Desentralisasi, Asia Tenggara, Analisis Bibliometrik

A. PENDAHULUAN

Otoritarianisme dianggap sebagai ciri khas pemerintahan di banyak negara Asia Tenggara. Misalnya, pemerintahan Soeharto di Indonesia yang mengendalikan negara selama sekitar 32 tahun (1965-1998), serta pemerintahan Ferdinand Marcos yang memimpin Filipina dari 1975 hingga 1986, yang juga dianggap otoriter dan sangat sentralistik. Begitu pula dengan junta militer di Myanmar di bawah Jenderal Than Swe, yang merupakan contoh nyata dari pemerintahan otoriter yang tampaknya berkembang pesat di Asia Tenggara. Berbagai hal tersebut akhirnya menimbulkan gejolak dinamika sosial

politik yang pada akhir abad ke-20 ditandai dengan munculnya tren desentralisasi kekuasaan politik dari pusat ke daerah. Tren ini berkembang seiring dengan meningkatnya tuntutan untuk demokratisasi, yang menekankan bahwa daerah juga berhak diberikan kewenangan untuk mengatur urusan mereka sendiri, sehingga dapat menciptakan kemakmuran yang setara di tingkat lokal (Rochayati, 2017).

Demokratisasi diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan politik yang disebabkan oleh kebijakan yang tidak seimbang di masa otoritarianisme. Agenda demokratisasi ini kemudian diwujudkan

dalam bentuk reformasi institusional negara, yang termasuk desentralisasi, penguatan pemerintahan daerah, pemilihan umum, dan peningkatan partisipasi publik. Jika dilihat lebih dalam, ketiga kebijakan ini merupakan bagian dari proses desentralisasi itu sendiri. Akibatnya, desentralisasi menjadi bagian dari agenda demokratisasi global pada dekade 1990-an. Berbagai lembaga internasional seperti GTZ, JICA, USAID, IMF, dan Bank Dunia pun turut aktif mendorong berlangsungnya proses desentralisasi di wilayah Asia Tenggara (Rochayati, 2017).

Negara di Asia Tenggara yang terdiri atas Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Philippines, Cambodia, Singapore, Myanmar, Laos, East Timor dan Brunei Darussalam (Karuru, 2024) telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dengan berbagai negara mengadopsi kebijakan desentralisasi untuk memperbaiki efisiensi pemerintahan dan mendorong partisipasi masyarakat. Upaya desentralisasi yang dimulai di Asia Tenggara ini, salah satunya sebagai tanggapan terhadap berkurangnya otoritas dan legitimasi pemerintah nasional yang dipengaruhi oleh tren global dalam reformasi tata kelola (Sudhipongpracha, 2013).

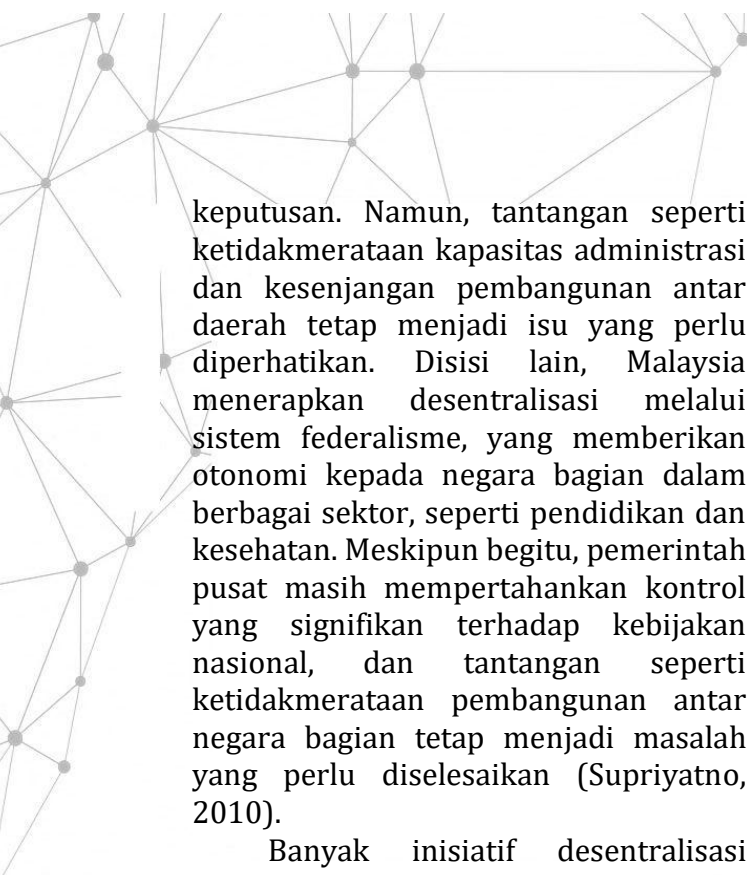
Desentralisasi sendiri dapat diartikan sebagai proses pemindahan kekuasaan dan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Wewenang yang diperoleh pemerintah daerah melalui proses ini sering disebut sebagai otonomi daerah (Legowo & Djadijono, 2006). Dengan desentralisasi, tujuan demokratisasi seperti terciptanya pemerintahan yang memiliki legitimasi kuat, tata kelola yang baik, dan peningkatan partisipasi masyarakat dapat terwujud.

Negara-negara di Asia Tenggara telah bereksperimen dengan model

desentralisasi yang berbeda-beda, dengan tujuan untuk mengalihkan tanggung jawab administratif kepada pemerintah lokal (Malesky & E Hutchinson, 2016). Di Indonesia misalnya, proses desentralisasi dimulai pada tahun 1999 melalui penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Proses ini mencakup pemindahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, termasuk di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun, pelaksanaan desentralisasi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakmerataan kapasitas pemerintah daerah dan perbedaan dalam sumber daya yang tersedia (Simanjuntak, 2015).

Lebih lanjut, negara Filipina yang memulai proses desentralisasi pada tahun 1991 dengan menerapkan Undang-Undang Local Government Code, yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan pelayanan publik. Namun, tantangan seperti ketimpangan pembangunan antar daerah dan ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat masih menjadi masalah yang perlu diatasi (Rochayati, 2017).

Thailand juga telah melaksanakan desentralisasi secara bertahap sejak 1997, dengan penekanan pada peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya lokal. Namun, proses desentralisasi di negara ini menghadapi tantangan terkait koordinasi antar tingkat pemerintahan dan ketidakmerataan distribusi sumber daya. Sementara itu, Vietnam memulai proses desentralisasi pada tahun 2002 dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan pelayanan publik. Langkah ini melibatkan pemberian lebih banyak otonomi kepada pemerintah lokal dalam hal pengelolaan sumber daya dan pengambilan



keputusan. Namun, tantangan seperti ketidakmerataan kapasitas administrasi dan kesenjangan pembangunan antar daerah tetap menjadi isu yang perlu diperhatikan. Disisi lain, Malaysia menerapkan desentralisasi melalui sistem federalisme, yang memberikan otonomi kepada negara bagian dalam berbagai sektor, seperti pendidikan dan kesehatan. Meskipun begitu, pemerintah pusat masih mempertahankan kontrol yang signifikan terhadap kebijakan nasional, dan tantangan seperti ketidakmerataan pembangunan antar negara bagian tetap menjadi masalah yang perlu diselesaikan (Supriyatno, 2010).

Banyak inisiatif desentralisasi telah menghadapi kemunduran dalam perjalanannya karena keengganan pemerintah pusat untuk sepenuhnya menyerahkan kekuasaan yang menyebabkan pemerintahan lokal tidak efektif (Malesky & E Hutchinson, 2016). Dimana Pemerintah daerah sering berjuang dengan sumber pendapatan yang tidak memadai dan sangat bergantung pada transfer fiskal dari otoritas pusat untuk memenuhi tanggung jawab pengeluarannya (Shotton, 2022). Terlepas dari potensi manfaat desentralisasi, masih terdapat perasaan kekecewaan mengenai sejauh mana efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas tentang tata kelola pemerintahan dan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah di Asia Tenggara.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat isu atau tema yang berkaitan dengan tren desentralisasi yang terjadi di Asia Tenggara. Disamping itu, keterbatasan publikasi mengenai topik desentralisasi yang terjadi di Asia Tenggara juga mendorong penulis untuk mengeksplorasi penelitian terkait hal tersebut, lalu mendeskripsikannya

dalam bentuk naratif dan visualisasi data guna mempermudah pemetaan tema atau topik (Creswell & Poth, 2018). Adapun fokus pertanyaan penelitian yang ingin dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tren publikasi penelitian mengenai desentralisasi di Asia Tenggara?
2. Peneliti dan artikel mana yang paling berpengaruh?
3. Bagaimana peta keterkaitan antar penulis dilihat dari negara afiliasi penulis?
4. Bagaimana peta keterkaitan topik/tema dilihat dari co-occurrence kata kunci yang digunakan oleh penulis?

B. TINJAUAN TEORI

1. Otoritarianisme dan Konteks Asia Tenggara

Otoritarianisme merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan kekuasaan pada satu pemimpin atau sekelompok kecil elite dengan membatasi partisipasi publik dalam proses politik. Dalam sistem ini, mekanisme pengawasan kekuasaan (check and balance) cenderung lemah, kebebasan sipil dibatasi, dan negara memegang kendali kuat terhadap politik, ekonomi, serta media (Linz, 2000). Fenomena ini banyak ditemukan di Asia Tenggara pada paruh kedua abad ke-20, yang dipengaruhi oleh warisan kolonial dengan sistem pemerintahan sentralistik, kondisi instabilitas politik pasca kemerdekaan, serta krisis ekonomi dan sosial yang mendorong elite politik memusatkan kekuasaan demi menjaga stabilitas negara. Contoh nyata pemerintahan otoriter dapat dilihat di Indonesia pada masa Orde Baru (1965–1998) di bawah Presiden Soeharto, yang memusatkan kekuasaan politik pada Golkar, membatasi kebebasan pers,

mengontrol organisasi masyarakat, dan menjalankan kebijakan ekonomi terpusat meskipun berhasil mencetak pertumbuhan ekonomi yang signifikan (Aspinall & Fealy, 2010). Di Filipina, Presiden Ferdinand Marcos memberlakukan martial law pada 1972–1986 yang memperkuat kekuasaan eksekutif, menekan oposisi politik, dan mengendalikan media, namun disertai praktik korupsi besar-besaran (Thompson, 1995). Sementara itu, Myanmar berada di bawah kendali junta militer sejak 1962, termasuk masa Jenderal Than Shwe, yang menjalankan pemerintahan represif, menekan kelompok etnis minoritas, dan membatasi kebebasan politik (Taylor, 2009).

Rezim otoriter di Asia Tenggara kerap membenarkan sentralisasi kekuasaan dengan alasan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Namun, pendekatan ini sering mengorbankan prinsip demokrasi, pemerataan pembangunan, dan perlindungan hak asasi manusia. Secara konseptual, fenomena ini dapat dianalisis melalui Teori Modernisasi Politik, yang menjelaskan bahwa otoritarianisme kerap dianggap sebagai tahap awal untuk menciptakan stabilitas sebelum transisi menuju demokrasi (Huntington, 1991). Akan tetapi, di banyak negara Asia Tenggara, transisi tersebut tertunda atau bahkan terhambat oleh kepentingan elite yang ingin mempertahankan kekuasaan. Kondisi ini memicu gelombang tuntutan demokratisasi pada akhir abad ke-20, yang mendorong agenda desentralisasi sebagai upaya mendistribusikan kekuasaan lebih merata, meningkatkan partisipasi publik, dan mengurangi dominasi pemerintah

pusat yang terbentuk pada era otoritarianisme (Rochayati, 2017).

2. Demokratisasi dan Desentralisasi

Desentralisasi merupakan konsep yang mengacu pada proses pemindahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau entitas lain di tingkat lokal. Secara teoritis, Rondinelli, Nellis, dan Cheema (1983) mengklasifikasikan desentralisasi ke dalam empat bentuk utama: (1) desentralisasi politik, yaitu pemberian kewenangan pengambilan keputusan kepada pemerintah daerah melalui mekanisme demokratis seperti pemilihan umum lokal; (2) desentralisasi administratif, yakni pelimpahan fungsi dan tanggung jawab administrasi publik kepada lembaga pemerintah daerah; (3) desentralisasi fiskal, yaitu transfer sumber pendapatan, pengelolaan anggaran, dan kewenangan fiskal ke daerah; serta (4) desentralisasi pasar, yakni pelibatan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah dalam penyediaan layanan publik. Dalam konteks demokratisasi, desentralisasi dipandang sebagai instrumen untuk meningkatkan partisipasi politik warga, memperkuat akuntabilitas, dan mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah (Faguet, 2014).

Di Asia Tenggara, agenda desentralisasi mulai menguat pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an, seiring dengan melemahnya legitimasi rezim otoriter dan meningkatnya tuntutan publik untuk mendapatkan akses yang lebih besar dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal. Proses ini juga didorong oleh lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia, IMF, USAID, JICA, dan GTZ, yang memandang desentralisasi sebagai strategi untuk



meningkatkan efisiensi pemerintahan dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi (World Bank, 2001). Teori Democratic Deepening menjelaskan bahwa desentralisasi tidak hanya menjadi instrumen teknokratis, tetapi juga sebagai bagian dari agenda global demokratisasi untuk memperluas ruang partisipasi warga negara dalam tata kelola publik (Smith, 1985). Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas institusi lokal, kesiapan sumber daya manusia, dan keberlanjutan dukungan politik dari pemerintah pusat.

Pengalaman di Asia Tenggara menunjukkan bahwa desentralisasi sering kali memiliki dinamika yang kompleks. Di Indonesia, penerapan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 menandai pergeseran radikal dari sentralisasi Orde Baru menuju otonomi daerah, termasuk pengelolaan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur oleh pemerintah kabupaten/kota. Di Filipina, Local Government Code tahun 1991 memberikan kewenangan luas bagi pemerintah daerah, meski ketergantungan terhadap dana alokasi pusat tetap menjadi kendala. Thailand mengadopsi desentralisasi secara bertahap pasca reformasi konstitusi 1997, dengan fokus pada pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Vietnam memulai desentralisasi pada 2002 dengan tujuan efisiensi administrasi, sementara Malaysia mengimplementasikannya dalam kerangka federalisme, di mana negara bagian memiliki kewenangan terbatas namun pemerintah pusat tetap memegang kontrol signifikan. Perbedaan model ini menunjukkan bahwa meskipun secara teori desentralisasi bertujuan memperkuat demokrasi, dalam praktiknya keberhasilannya dipengaruhi oleh

konfigurasi politik, relasi pusat-daerah, dan kultur birokrasi di masing-masing negara.

3. Teori Otonomi Daerah dan Good Governance

Otonomi daerah secara teoritis diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Davey (1993), otonomi daerah mencakup kebebasan dalam merumuskan kebijakan, mengelola sumber daya, dan menyediakan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Cheema dan Rondinelli (2007) yang menyatakan bahwa otonomi daerah efektif hanya jika dilengkapi dengan kapasitas kelembagaan, sumber daya yang memadai, dan akuntabilitas publik yang kuat.

Konsep otonomi daerah sangat terkait erat dengan prinsip good governance, yang menurut UNDP (1997) terdiri atas delapan elemen utama: partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas. Desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan menjadi instrumen untuk memperkuat prinsip-prinsip tersebut dengan memberikan ruang bagi partisipasi aktif warga dan meminimalisasi praktik sentralisasi kekuasaan yang berpotensi memunculkan otoritarianisme. World Bank (1992) menekankan bahwa tata

kelola pemerintahan yang baik hanya dapat dicapai apabila ada keseimbangan antara kewenangan yang diberikan dan mekanisme pengawasan yang memadai di tingkat daerah.

Di Asia Tenggara, penerapan otonomi daerah sebagai bagian dari agenda *good governance* menunjukkan variasi hasil. Indonesia menjadi salah satu negara dengan model otonomi daerah yang luas, memberikan kewenangan signifikan kepada pemerintah kabupaten/kota. Namun, tantangan seperti korupsi di tingkat daerah, lemahnya kapasitas birokrasi, dan ketergantungan pada dana transfer pusat sering kali menghambat efektivitasnya (Buehler, 2010). Di sisi lain, Malaysia dengan sistem federalisme memberikan otonomi terbatas pada negara bagian, namun keberhasilan tata kelola sangat bervariasi antar wilayah. Thailand dan Filipina juga mengintegrasikan prinsip *good governance* dalam program desentralisasi, meski masih menghadapi persoalan koordinasi dan distribusi sumber daya. Hal ini menunjukkan bahwa otonomi daerah dan *good governance* tidak dapat berjalan efektif hanya melalui kebijakan formal, melainkan memerlukan komitmen politik, kapasitas kelembagaan, dan partisipasi publik yang berkelanjutan.

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis bibliometrik. Analisis bibliometrik merupakan metode yang digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai suatu topik penelitian, dengan tujuan untuk memetakan bidang ilmu tertentu dalam literatur serta mengeksplorasi potensi penelitian di masa mendatang (Khan et

al., 2022). Dalam penelitian ini, analisis bibliometrik dilakukan dengan bantuan perangkat lunak VOSviewer. VOSviewer berfungsi untuk memvisualisasikan data bibliometrik, seperti keterkaitan antar-jurnal, judul, penulis, dan tahun publikasi (Hanifah et al., 2022). Melalui aplikasi ini, peneliti dapat memetakan jaringan penulis, organisasi, dan negara; menganalisis hubungan antar-kata kunci, baik kata kunci umum maupun kata kunci yang digunakan penulis; serta melakukan analisis sitasi yang mencakup dokumen, sumber, penulis, organisasi, maupun negara sesuai dengan topik penelitian (Samsara, 2022).

Tahap pertama yang dilakukan peneliti adalah menelusuri artikel melalui database Scopus. Pemilihan Scopus didasarkan pada cakupannya yang luas terhadap jurnal bereputasi internasional dan fungsinya sebagai platform komprehensif yang menyediakan data bibliografi yang kredibel (Pranckutė, 2021). Setelah itu, peneliti menentukan kata kunci pencarian yang difokuskan pada *article title* dan *keywords* dengan kombinasi “(decentralization OR decentralisation) AND (Indonesia OR Malaysia OR Thailand OR Vietnam OR Philippines OR Cambodia OR Singapore OR Myanmar OR Laos OR 'East Timor' OR 'Brunei Darussalam')”. Penelusuran ini tidak dibatasi oleh tahun publikasi agar dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai perkembangan penelitian terkait desentralisasi di kawasan Asia Tenggara.

Artikel yang diperoleh dari pencarian awal kemudian diseleksi berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria inklusi yang ditetapkan adalah bahwa artikel harus berupa publikasi ilmiah yang sudah terbit, berbentuk *journal article*, dan menggunakan bahasa Inggris agar dapat dianalisis secara

konsisten. Sementara itu, kriteria eksklusif meliputi artikel yang berbentuk conference proceedings, review articles, editorial notes, atau book chapters karena tidak termasuk dalam fokus penelitian, artikel yang tidak berbahasa Inggris sehingga menyulitkan dalam standarisasi analisis kata kunci, serta artikel yang tidak relevan dengan tema desentralisasi di Asia Tenggara meskipun mengandung kata kunci serupa, misalnya artikel yang membahas desentralisasi dalam bidang kesehatan hewan atau biologi yang tidak berkaitan dengan tata kelola pemerintahan.

Dari hasil penelusuran awal sebanyak 367 dokumen, terdapat 131 artikel yang dikecualikan karena tidak memenuhi kriteria inklusi, sehingga tersisa total 236 artikel jurnal yang digunakan sebagai bahan analisis. Seluruh artikel yang memenuhi kriteria kemudian diekspor ke dalam format CSV/RIS untuk selanjutnya dianalisis menggunakan aplikasi VOSviewer, dengan fokus pada pemetaan jaringan kata kunci, keterhubungan antar-penulis, serta distribusi penelitian berdasarkan negara dan institusi.

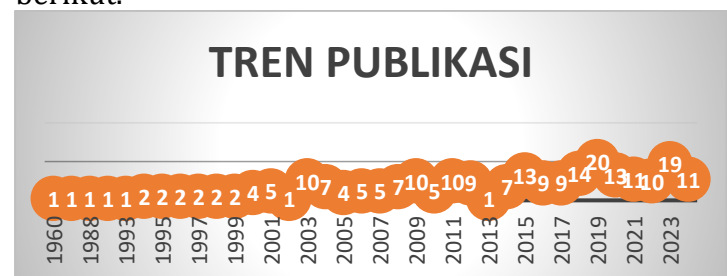
D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tren Publikasi

Hasil analisis tren publikasi pada penelitian desentralisasi di Asia Tenggara, peneliti uraikan dengan menjangkau sejumlah artikel berbentuk jurnal. Artikel jurnal dipilih karena sifatnya yang dinamis, di mana publikasinya dapat berkembang dengan lebih cepat dibandingkan dengan jenis artikel lainnya, seperti buku, bab buku, atau prosiding (Samsara, 2022). Oleh karena itu, dalam tulisan ini, dokumen yang dianalisis berupa publikasi dalam bentuk artikel jurnal sejumlah 236 artikel Scopus dengan *keywords*:

decentralization OR decentralisation AND Indonesia OR Malaysia OR Thailand OR Vietnam OR Philippines OR Cambodia OR Singapore OR Myanmar OR Laos OR "East Timor" OR "Brunei Darussalam".

Berdasarkan hasil analisis tren publikasi, dapat diketahui bahwa tren desentralisasi di Asia Tenggara sudah mulai mendapatkan atensi penelitian sejak tahun 1960. Meskipun telah mendapatkan perhatian sejak tahun 1960an, topik tersebut hanya memiliki jumlah publikasi ($n=17$) sampai sebelum tahun 2000an. Kemudian, mulai dari tahun 2000 hingga tahun 2024, jumlah publikasi terbanyak terjadi pada tahun 2019 dengan jumlah publikasi ($n=20$) sebagaimana tampilan pada gambar berikut.



Sumber: Scopus diolah penulis (2025)

Gambar 1. Tren Publikasi Penelitian Desentralisasi di Asia Tenggara

Gambar 1 menunjukkan bahwa tren publikasi terkait topik penelitian desentralisasi di Asia Tenggara mengalami fluktuasi mulai tahun 1960 sampai tahun 2024. Dimana pada tahun 1960 sampai 1999, publikasi yang terjadi hanya pada tahun 1960, 1978, 1988, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 dengan publikasi terbanyak terjadi mulai tahun 1994-1999 sejumlah ($n=2$). Kemudian mulai tahun 2000 sampai 2024, paling sedikit jumlah publikasi terjadi pada tahun 2002 dan 2013 dengan jumlah ($n=1$), sedangkan publikasi terbanyak terjadi pada tahun 2019 dengan jumlah ($n=20$). Setelah itu, mulai tahun 2020 sampai tahun 2024, publikasi terkait topik memiliki jumlah tertinggi pada tahun 2023 dengan jumlah ($n=19$). Namun

kembali menurun pada tahun 2024 dengan jumlah (n=11).

Peneliti Dan Artikel Yang Paling Berpengaruh

Peneliti dan artikel yang paling berpengaruh dapat diketahui berdasarkan jumlah sitasi yang didapat didalam suatu artikel penelitian. Dimana jumlah sitasi artikel yang terjaring dalam analisis yang dilakukan penulis sesuai topik dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1
Jumlah Sitasi Artikel

No	Penulis	Judul	Tahun	Jumlah Sitasi
1	Hadiz V.R.	<i>Decentralization and democracy in Indonesia: A critique of neo-institutionalist perspectives</i>	2004	213
2	McCarthy J.F.	<i>Changing to gray: Decentralization and the emergence of volatile socio-legal configurations in Central Kalimantan, Indonesia</i>	2004	153
3	Sahide M.A.K.; Supratman S.; Maryudi A.; Kim Y.-S.; Giessen L.	<i>Decentralisation Policy as Recentralisation Strategy: Forest Management Units and Community Forestry in Indonesia</i>	2016	110
4	Wever L.; Glaser M.; Gorris P.; Ferrol-Schulte D.	<i>Decentralization and participation in integrated coastal management: Policy lessons from Brazil and Indonesia</i>	2012	102
5	Firman T.	<i>Decentralization reform and local-government proliferation in Indonesia: Towards a fragmentation of regional development</i>	2009	92
6	Duncan C.R.	<i>Mixed outcomes: The impact of regional autonomy and decentralization on indigenous ethnic minorities in Indonesia</i>	2007	89
7	Marks D.; Lebel L.	<i>Disaster governance and the scalar politics of incomplete decentralization: Fragmented and contested responses to the 2011 floods in Central Thailand</i>	2016	86
8	Satria A.; Matsuda Y.	<i>Decentralization of fisheries management in Indonesia</i>	2004	80
9	Kristiansen S.; Santoso P.	<i>Surviving decentralisation? Impacts of regional</i>	2006	80

		<i>autonomy on health service provision in Indonesia</i>		
10	Resosudarmo I.A.P.	<i>Closer to people and trees: Will decentralisation work for the people and the forests of Indonesia?</i>	2004	78

Sumber: Scopus diolah penulis (2025)

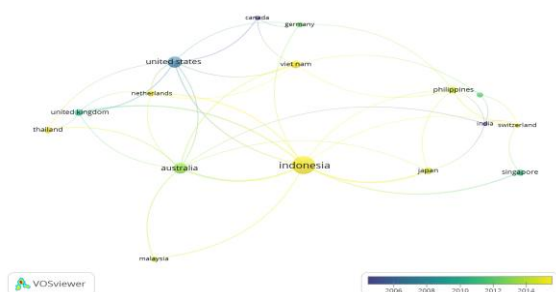
Tabel 1 menunjukkan hasil sitasi artikel dari total 236 artikel Scopus yang terjaring melalui database Scopus. Dari seluruh artikel tersebut, dipilihlah (n=10) artikel dengan nilai sitasi tertinggi. Dari data tabel 1, terlihat bahwa artikel dengan judul *Decentralization and democracy in Indonesia: A critique of neo-institutionalist perspectives* memperoleh jumlah sitasi tertinggi, yaitu 213. Kemudian diikuti oleh artikel berjudul *Changing to gray: Decentralization and the emergence of volatile socio-legal configurations in Central Kalimantan, Indonesia* dengan jumlah sitasi 153. Diurutan ketiga ditempati oleh artikel berjudul *Decentralisation Policy as Recentralisation Strategy: Forest Management Units and Community Forestry in Indonesia* dengan jumlah sitasi 110. Kemudian di urutan 10 dengan jumlah sitasi 78 dimiliki oleh artikel berjudul *Closer to people and trees: Will decentralisation work for the people and the forests of Indonesia?*

Berdasarkan hasil analisis jumlah sitasi terbanyak, dapat diketahui pula mengenai peneliti yang paling berpengaruh dalam topik terkait. Untuk urutan pertama ditempati oleh Hadiz V.R. dengan penelitian yang dipublikasikan pada tahun 2004. Kemudian di urutan kedua, artikel tersebut ditulis oleh McCarthy J.F. dan dipublikasikan masih pada tahun yang sama, yaitu 2004. Setelah itu, peneliti bernama Sahide M.A.K.; Supratman S.; Maryudi A.; Kim Y.-S.; Giessen L yang mempublikasikan penelitian pada tahun 2016. Terakhir, urutan kesepuluh ditempati oleh Resosudarmo I.A.P. yang

melakukan publikasi pada tahun 2004. Dari hasil jumlah sitasi tersebut, peneliti mendapati bahwa banyak sedikitnya sitasi yang dimiliki tidak dipengaruhi oleh pola tahun tertentu.

Peta Keterkaitan Antar Penulis Dilihat Dari Negara Afiliasi Penulis

Berdasarkan hasil visualisasi unit analisis hubungan *co-authorship* jika dilihat dari afiliasi negara asal penulis, dapat diketahui bahwa penulis yang berasal dari afiliasi negara Indonesia mendominasi dalam publikasi. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya bulatan item negara Indonesia dibandingkan dengan negara lainnya. Disamping itu penulis dari Indonesia juga memiliki keterkaitan (jaringan/link) serta jumlah dokumen tertinggi dibandingkan dengan negara lainnya sebagaimana tampilan berikut.



Sumber: *VOSviewer* diolah penulis (2025)
Gambar 2. Visualisasi *Co-Authorship*
Berdasarkan Negara Afiliasi

Gambar 2 menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara dengan bulatan terbesar. Dimana Indonesia memiliki jumlah dokumen tertinggi sebanyak ($n=86$) dengan total kekuatan jaringan tertinggi sebanyak 32 dan diikuti oleh negara-negara lainnya sebagaimana uraian berikut:

Tabel 2
Negara Afiliasi Penulis, Jumlah Dokumen dan Total Kekuatan Jaringan

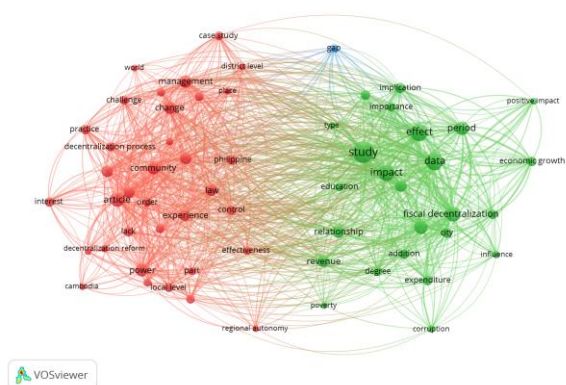
No	Negara	Dokumen	Total Link Strength
1	Indonesia	86	32
2	Australia	32	20
3	United States	34	16
4	United Kingdom	13	10
5	Japan	12	9
6	Philippines	12	9
7	Netherlands	9	8
8	Vietnam	16	8
9	Switzerland	5	6
10	France	7	5
11	India	5	5
12	Canada	6	4
13	Germany	8	4
14	Malaysia	7	4
15	Singapore	10	4
16	Thailand	11	4

Sumber: *VOSviewer* diolah penulis (2025)

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa terdapat 16 (enam belas) afiliasi negara penulis dengan urutan tertinggi adalah Indonesia dan urutan terakhir adalah Thailand. Dimana jika hanya melihat negara-negara yang berada di Asia Tenggara, setelah Indonesia ada negara Philippines yang berada pada urutan 6 (enam) dengan total dokumen 12 dan memiliki keterkaitan (jaringan/link) sebanyak 9 (sembilan). Kemudian dilanjutkan oleh negara Vietnam yang berada pada urutan 8 (delapan) dengan total dokumen 16 dan memiliki keterkaitan (jaringan/link) sebanyak 8 (delapan). Selanjutnya berturut-turut diikuti oleh negara Malaysia, Singapore dan Thailand dengan jumlah dokumen berturut-turut adalah 7 (tujuh), 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) serta memiliki keterkaitan (jaringan/link) masing-masing sebanyak 4 (empat).

Peta Hubungan tema pada Co-Occurrence

Perangkat lunak *VOSviewer* juga dapat digunakan untuk menganalisis tema-tema yang berkaitan dengan topik tertentu. Unit analisis tersebut, yang dikenal sebagai item (objek penelitian), dapat berupa peneliti, publikasi, atau kata kunci yang digunakan dalam artikel. Dalam analisis *co-occurrence*, unit analisis ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema yang saling terkait, melihat perkembangan penelitian, serta memetakan tema-tema yang masih jarang diteliti, sehingga membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut di masa depan (Van Eck & Waltman, 2023). Guna menjawab rumusan masalah keempat, item analisis berupa peta jaringan berdasarkan *co-occurrence* dari kata kunci, peneliti sajikan sebagaimana berikut.

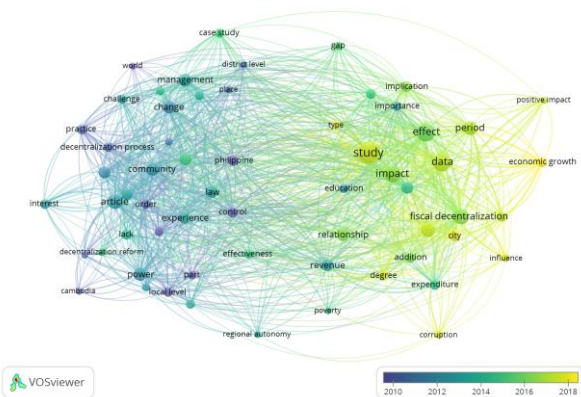


Sumber: Vosviewer diolah penulis (2025)
Gambar 3. Visualisasi Peta Jaringan Co-occurrence berdasarkan Kata Kunci Penulis

Gambar 3 menunjukkan hasil visualisasi peta jaringan yang didasarkan pada *co-occurrence* dari kata kunci penulis. Dimana berdasarkan hasil visualisasi peta jaringan tersebut, topik terkait desentralisasi di Asia Tenggara dibagi menjadi 3 (tiga) kluster. Adapun pengelompokan tema berdasarkan kluster, yaitu kluster pertama terdiri dari 35 (tiga puluh lima) item tema yaitu *accountability*, *article*, *authority*,

Cambodia, *case study*, *challenge*, *change*, *community*, *context*, *control*, *decentralization*, *process*, *decentralization reform*, *democracy*, *devolution*, *difference*, *district level*, *effectiveness*, *experience*, *governance*, *interest*, *lack*, *law*, *local level*, *management*, *order*, *part*, *Philippine*, *place*, *power*, *practice*, *regional autonomy*, *responsibility*, *success*, *Thailand*, *world*. Kluster kedua terdiri atas 25 (dua puluh lima) item tema yaitu *addition*, *city*, *corruption*, *data*, *degree*, *economic growth*, *education*, *effect*, *evidence*, *expenditure*, *fiscal decentralisation*, *fiscal decentralization*, *impact*, *implication*, *importance*, *influence*, *performance*, *period*, *positive impact*, *poverty*, *relationship*, *revenue*, *study*, *type*, *vietnam*. Kluster ketiga terdiri atas 1 (satu) item tema yaitu *gap*. Dari kluster-kluster tersebut, dapat dilihat bahwa pemetaan kluster ditentukan oleh tema-tema yang memiliki kesamaan dalam bidang kajian ilmiah.

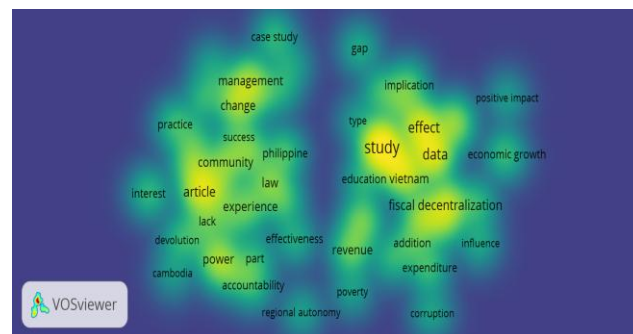
Setelah kesamaan topik dipetakan kedalam kluster-kluster, analisis selanjutnya adalah histori publikasi. *Vosviewer* menggambarkan histori publikasi dalam tampilan item *co-occurrence* dengan warna yang berbeda sesuai tahun publikasinya. Dimana semakin gelap warna item (keunguan), semakin lama tema tersebut dibahas, sedangkan semakin kuning warna item, semakin besar perhatian terhadap tema tersebut di tahun-tahun mendatang. Adapun tampilan visualisasi *Overlay co-occurrence* penulis sajikan sebagai berikut.



Sumber: Vosviewer diolah penulis (2025)
Gambar 4. Visualisasi *Overlay Co-occurrence* berdasarkan Tahun

Gambar 4 menunjukkan hasil visualisasi *Overlay Co-occurrence* dari rentang tahun 2010 sampai 2018. Dimana dari visualisasi gambar tersebut, item *study* merupakan satu-satunya item yang paling sering dibahas karena memiliki bulatan paling besar dibanding item lainnya. Kemudian juga terdapat item lain yang sering dibahas dengan bulatan yang cukup besar dibanding lainnya, seperti *effect*, *data* dan *period*. Namun jika dilihat dari warna tampilan, item *study*, *data*, *period*, *type*, *positive impact*, *economic growth*, *fiscal decentralization*, *city*, *influence*, *degree* dan *corruption* menjadi topik-topik yang baru mulai dibahas sejak tahun 2018. Sedangkan lainnya dengan warna bulatan item biru tua keunguan menjadi topik-topik yang telah lama dibahas sejak tahun 2010. Dari pemetaan tersebut dapat diketahui bahwa *fiscal decentralization* menjadi salah satu topik yang banyak diteliti mulai tahun 2018an.

Lebih lanjut, tingkat kejenuhan topik-topik yang sering muncul dalam penelitian juga bisa dianalisis melalui fitur *density* didalam *Vosviewer*. Fitur ini mengukur tingkat kerapatan item yang dilihat dari kerapatan warna pada hasil visualisasi jaringan. Adapun tampilan visualisasi *density* dan kluster penelitian penulis sajikan sebagai berikut.



Sumber: Vosviewer diolah penulis (2025)
Gambar 5. Visualisasi *Density* dan Kluster Penelitian

Gambar 5 merupakan tampilan hasil visualisasi *density* dan kluster penelitian sesuai dengan topik yang diambil penulis. Dari hasil visualisasi *density* tersebut dapat diketahui bahwa hasil analisis kerapatan penelitian item *study*, *effect*, *data*, *Vietnam*, *decentralization*, *management*, *change*, *article*, *power* dan *fiscal decentralization* termasuk dalam bulatan kuning yang lebih pekat dibanding seluruh item lainnya. Artinya, topik pada item tersebut paling sering dibahas pada penelitian terkait tren desentralisasi di Asia Tenggara. Kemudian dapat diketahui pula topik yang masih jarang dibahas/mendapat perhatian dari peneliti, antara lain *accountability*, *regional autonomy*, *poverty*, *expenditure*, *influence*, *devolution*, *interest*, *practice*, *effectiveness*, *case study*, *gap*, *positive impact*, *economic growth* dan *corruption*. Topik-topik tersebut sangat potensial untuk diteliti lebih lanjut dimasa yang akan datang.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

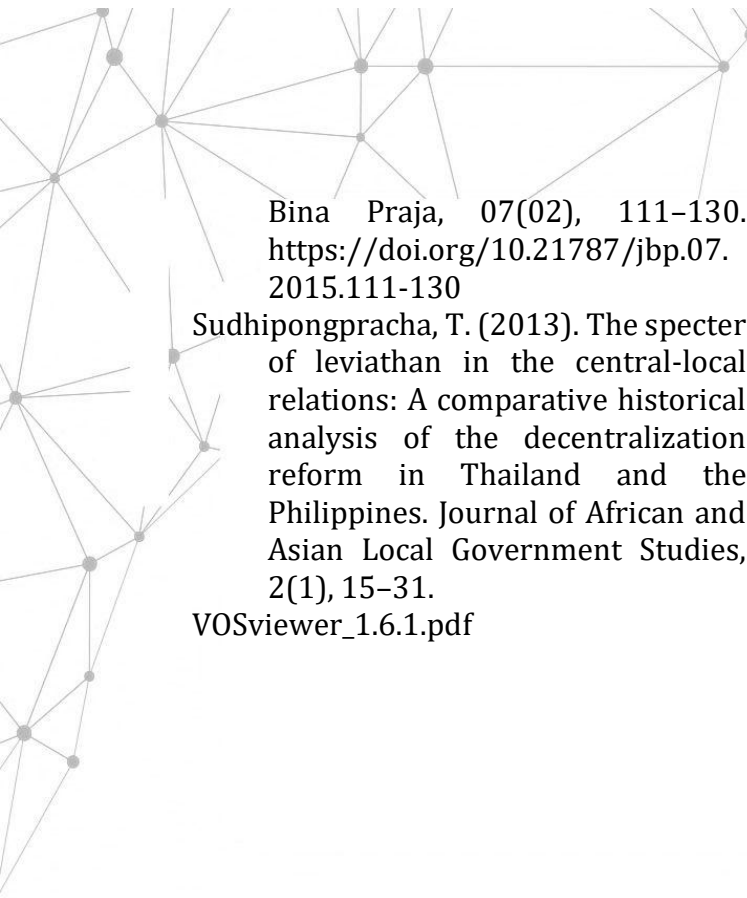
Hasil analisis bibliometrik pada topik penelitian tren desentralisasi di Asia Tenggara mendapat penjarangan artikel Scopus melalui database Scopus sejumlah 236 artikel jurnal. Topik tersebut sudah mulai mendapatkan atensi penelitian sejak 1960. Dan hingga rentang tahun 2024, jumlah publikasi tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan

total publikasi (n=20). Kemudian jika dilihat dari sisi peneliti dan artikel yang paling berpengaruh, dapat diketahui bahwa artikel dengan judul *Decentralization and democracy in Indonesia: A critique of neo-institutionalist perspectives* memperoleh jumlah sitasi tertinggi sebanyak 213 sitasi. Artikel tersebut ditulis oleh Hadiz V.R. dengan penelitian yang dipublikasikan pada tahun 2004.

Hasil analisis artikel jika dilihat dari penulis dengan urutan tertinggi berasal dari negara Indonesia, dengan publikasi terbanyak yaitu 86 artikel dan 32 total jaringan. Kemudian jika dilihat dari peta keterkaitan topik/tema dari co-occurrence kata kunci yang digunakan oleh peneliti adalah terbentuknya 3 (tiga) kluster. Jika dilihat dari histori publikasi, item study merupakan satu-satunya topik yang paling sering dibahas, dengan fiscal decentralization sebagai salah satu topik yang banyak diteliti mulai tahun 2018an. Adapun topik-topik potensial yang dapat diteliti lebih lanjut dimasa yang akan datang adalah accountability, regional autonomy, poverty, expenditure, influence, devolution, interest, practice, effectiveness, case study, gap, positive impact, economic growth dan corruption

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry & research design* (Fourth edi). Sage Publications.
- Hanifah, S., Abdillah, T. D. F., & Wachyudi, K. (2022). Analisis bibliometrik dalam mencari research gap menggunakan aplikasi vosviewer dan aplikasi publish or perish. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(7), 2713–2728.
- Karuru, Z. (2024). Daftar lengkap negara dan ibukota di ASEAN - ANTARA News. ANTARA. https://www.antaranews.com/berita/4261551/daftar-lengkap-negara-dan-ibukota-di-asean#google_vignette
- Khan, A., Goodell, J. W., Hassan, M. K., & Paltrinieri, A. (2022). A bibliometric review of finance bibliometric papers. *Finance Research Letters*, 47, 102520.
- Legowo, T. A., & Djadijono, M. (2006). *Decentralization In Indonesia: How Far Can It Go?(1999–2006)*. Retrieved December, 28, 2005.
- Malesky, E. J., & E Hutchinson, F. (2016). *Varieties of Disappointment: Why Has Decentralization Not Delivered on Its Promises in Southeast Asia?* *Southeast Asian Economies*, 33(2), 125–138. <https://doi.org/10.1355/ae33-2a>
- Pranckutė, R. (2021). Web of Science (WoS) and Scopus: The titans of bibliographic information in today's academic world. *Publications*, 9(1), 12.
- Rochayati, N. (2017). *Dinamika Demokrasi Lokal Di Asia Tenggara: Desentralisasi, Pilkada, Dan Konflik Kekerasan di Indonesia Dan Filipina*. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 10(2), 135–149.
- Samsara, L. (2022). Tren publikasi collaborative governance sebuah analisis bibliometrik. *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 18(2), 308–325.
- Shotton, R. (2022). *Fiscal Decentralization in Asia and the Pacific*. In *Decentralization, Local Governance, and Localizing the Sustainable Development Goals in Asia and the Pacific* (pp. 42–71). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003282297-3>
- Simanjuntak, K. (2015). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal*



Bina Praja, 07(02), 111-130.
<https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.111-130>

Sudhipongpracha, T. (2013). The specter of leviathan in the central-local relations: A comparative historical analysis of the decentralization reform in Thailand and the Philippines. *Journal of African and Asian Local Government Studies*, 2(1), 15-31.

VOSviewer_1.6.1.pdf

Supriyatno, Y. (2010). Perbandingan Kebijakan Desentralisasi di Beberapa Negara Asia Tenggara. *Journal Kybernan*, 1(1), 117.

Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2023). *VOSviewer Manual version 1-6-19*. Leiden: Univeriteit Leiden, January, 54.
http://www.vosviewer.com/documentation/Manual_